

# ANALISIS GENDER TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN CSR BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL PT HOLCIM INDONESIA Tbk

*Gender Analysis on CSR Program of Local Economic Empowerment by PT Holcim Indonesia Tbk*

Debbie Luciani Prastiwi\*) dan Titik Sumarti

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

\*) Email : [debbielp@yahoo.co.id](mailto:debbielp@yahoo.co.id)

Diterima 13 Februari 2012 / Disetujui 2 April 2012

## ABSTRAK

*Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi is Corporate Social Responsibility (CSR) of local economic empowerment by PT Holcim Indonesia Tbk. Gender analysis is used as an analysis tools to see the success rate of BMT Swadaya Pribumi from a gender perspective by understanding the roles (division of labour) in the household, access, control to get resources (credit, training, and mentoring efforts), and the benefits for participants. Quantitatively, BMT is successful and it has considered gender practical and strategic gender needs are different between the participants of women and men.*

**Key words** : *gender equality, practical needs and strategic needs.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Hubeis (2010) kualitas hidup manusia dapat diukur berdasarkan pengukuran *Human Development Index* (HDI), *Gender Development Index* (GDI), dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Ketiga pengukuran tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi kualitas hidup dan pembangunan manusia serta mengukur kesetaraan dan keadilan gender secara global. Nilai HDI Indonesia tahun 2007-2008 berada pada peringkat 107 dan tahun 2009 HDI Indonesia mengalami penurunan, yaitu berada pada peringkat 111 dengan predikat *Medium Human Development*<sup>1</sup>. Nilai GEM Indonesia tahun 2009 berada pada peringkat 96 dari 177 negara<sup>2</sup>. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di Indonesia masih tergolong lebih rendah daripada negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Nilai HDI Malaysia tahun 2009 berada pada peringkat 66 dan GEM Malaysia tahun 2009 berada pada peringkat 68 dengan predikat *High Human Development*<sup>3</sup>. Negara ASEAN lainnya adalah Singapura yang termasuk negara dengan predikat *Very High Human*

*Development*. HDI Singapura tahun 2009 berada pada peringkat 23 dan GEM Singapura tahun 2009 berada pada peringkat 16<sup>4</sup>. Hasil dari HDI, GDI, dan GEM Indonesia yang rendah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender (*gap*) antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terdapat pada peran (pembagian kerja), akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional GBHN Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pogram Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan salah satu upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pembangunan nasional. Bentuk upaya nasional lainnya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender juga dilakukan secara internasional melalui tujuan ketiga MDGs, yaitu memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Salah satu program perusahaan yang sedang gencar dilakukan saat ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau disebut juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development*, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku

<sup>1</sup> [HDI] Human Development Report. 2009. *Human Development Index* (HDI). [Internet]. [dunduh 28 April 2010]. Dapat diunduh dari: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2009\\_EN\\_Table\\_K.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf)

<sup>2</sup> [HDI] Human Development Report. 2009. *Gender Empowerment Measure* (GEM). [Internet]. [diunduh 28 April 2010]. Format/ Ukuran: PDF/ 113 KB. Dapat diunduh dari: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2009\\_EN\\_Table\\_K.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_K.pdf)

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya.

CSR tidak lagi berorientasi pada nilai perusahaan semata (*single bottom line*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), melainkan harus berorientasi pada tiga pilar utama (*triple bottom lines*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*), dan aspek lingkungan (*planet*) yang saling bersinergi memberdayakan masyarakat (Solihin, 2009). CSR tidak hanya menjadi suatu bentuk kewajiban tetapi juga dapat menjadi bentuk promosi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha (Wibisono, 2007). Setiap perusahaan memiliki berbagai bentuk kebijakan, program, atau kegiatan dalam mengimplementasikan CSR.

Pembiayaan usaha mikro melalui *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Swadaya Pribumi merupakan salah satu program CSR PT Holcim Indonesia Tbk di bidang pemberdayaan ekonomi lokal. BMT Swadaya Pribumi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola keuangan masyarakat yang menggunakan sistem *syari'ah* dalam pengelolaan dan pembagian hasilnya. Kegiatan BMT Swadaya Pribumi melibatkan kontribusi dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui produk pembiayaan (kredit) dan produk simpanan (tabungan). Menurut penuturan Koordinator *Community Relation* Holcim Indonesia Pabrik Narogong, BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu program CSR Holcim yang sukses dan berkelanjutan<sup>5</sup>. Hingga Desember 2010, sudah lebih dari 3.000 warga sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong telah mendapatkan manfaat fasilitas tabungan dan pinjaman dana untuk pengembangan usaha ataupun kebutuhan lainnya.

Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memberikan manfaat bagi pesertanya telah diakui oleh pihak perusahaan dan pengurus BMT Swadaya Pribumi, namun apakah keberhasilan BMT Swadaya Pribumi telah mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan yang berbeda antara peserta perempuan dan peserta laki-laki? Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis gender terhadap keberhasilan BMT Swadaya Pribumi, khususnya pada produk pembiayaan (kredit) untuk mengetahui apakah program BMT Swadaya Pribumi telah mempertimbangkan kesetaraan gender antara peserta perempuan dan peserta laki-laki dalam pelaksanaannya? dan apakah program BMT Swadaya Pribumi masih

bersifat bias gender<sup>6</sup>, netral gender<sup>7</sup>, atau telah responsif gender<sup>8</sup>?

### Rumusan Masalah

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, peserta perempuan dan peserta laki-laki. Peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terdiri atas peserta perempuan dan peserta laki-laki dengan karakteristik sosial-ekonomi (tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan) dan karakteristik demografi (umur dan status perkawinan) yang beragam. Berdasarkan keterangan dari Manajer BMT Swadaya Pribumi, jumlah peserta perempuan sekitar 60 persen sedangkan peserta laki-laki sekitar 40 persen sehingga perempuan yang menjadi peserta BMT Swadaya Pribumi lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki<sup>9</sup>, namun apakah kuantitas peserta perempuan yang lebih banyak daripada peserta laki-laki tersebut mengindikasikan peserta perempuan memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang juga besar terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha) dari BMT Swadaya Pribumi?

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik individu peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan) terpilah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) serta hubungannya dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi?
2. Bagaimana peran (pembagian kerja) peserta BMT Swadaya Pribumi dalam rumah tangga peserta?
3. Sejauhmana tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dilihat dari akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta serta hubungannya dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi?
4. Sejauhmana tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dilihat dari ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi?

### Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam pemenuhan kebutuhan gender yang berbeda antara peserta perempuan dan peserta laki-laki melalui suatu alat analisis, yaitu analisis gender (pada penelitian ini menggunakan teknik analisis gender Harvard dan teknik analisis gender Moser). Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas,

<sup>6</sup> Bias gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang memihak pada salah satu jenis kelamin.

<sup>7</sup> Netral gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

<sup>8</sup> Responsif gender adalah kebijakan, program, atau kegiatan yang telah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Manajer BMT Swadaya Pribumi pada tanggal 7 Oktober 2011.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator *Community Relation* Holcim Indonesia Pabrik Narogong pada tanggal 9 September 2011.

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis:

1. Karakteristik individu terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai faktor internal peserta yang meliputi umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan peserta serta hubungannya dengan kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
2. Isu beban kerja berlebih (*over burden*) yang dialami oleh salah satu pihak (perempuan atau laki-laki) melalui analisis peran (pembagian kerja) peserta BMT Swadaya Pribumi dalam rumah tangga peserta.
3. Kesetaraan gender yang meliputi akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta BMT Swadaya Pribumi.
4. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dilihat dari ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi.
5. Hubungan antara kesetaraan gender dengan keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.

### Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak yang berminat terhadap studi gender dan terkait dengan CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal, manfaat tersebut diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenaan CSR dan analisis gender untuk dapat mengetahui Sejauhmana program CSR pemberdayaan ekonomi lokal BMT Swadaya Pribumi telah responsif gender.
2. Bagi perusahaan, yaitu PT Holcim Indonesia Tbk dan BMT Swadaya Pribumi diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, khususnya BMT Swadaya Pribumi agar dapat menjadi suatu perbaikan bagi program CSR selanjutnya.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai konsep dan analisis gender dalam program CSR sebagai suatu upaya untuk mencapai kesetaraan gender.

### PENDEKATAN TEORITIS

#### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi CSR menurut Sukada *et al.* (2007) adalah "Segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak-dampak positif di setiap pilar". Definisi CSR menurut ISO 26000 adalah:

*"Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and*

*ethical behaviour that is consistent with sustainable development and welfare of society; tasks into account the expectation of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization".*

Peningkatan ekonomi masyarakat lokal adalah konsentrasi CSR pada *eksternal stakeholders*. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi komunitas sekitar perusahaan, maka perusahaan telah turut berpartisipasi mengurangi kemiskinan yang merupakan tujuan pertama yang tercantum dalam MDGs. Pemberdayaan ekonomi lokal berarti memampukan masyarakat sekitar agar dapat mandiri secara ekonomi atau setidaknya tidaknya memberikan pemacu agar terjadi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi lokal dapat digolongkan dalam penyediaan modal manusia (*human capital*) dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, usaha (*business capital*) dapat dalam bentuk pemberian mesin dan peralatan, serta pengetahuan (*knowledge capital*) dalam bentuk pemberian pengetahuan (Radyati, 2008). Menurut Hubeis (2010), pemanfaatan dana CSR dalam konteks ekonomi makro merupakan sarana cerdas dan tangguh dalam memberdayakan perempuan menuju ketahanan ekonomi keluarga melalui pendidikan dan model PENDANAAN PLUS (Pelatihan dan Pendampingan Usaha). Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu program CSR PT Holcim Indonesia Tbk melalui pelaksanaan *Baitul Maal wa Tamwil* Swadaya Pribumi.

#### *Baitul Maal wa Tamwil*

Sistem ekonomi dan perbankan yang dominan dikembangkan di Indonesia adalah sistem perbankan konvensional yang menggunakan teori dari Negara Barat. Perbankan konvensional memberikan permodalan kepada peminjam modal dengan peraturan yang rumit dan kewajiban membayar bunga yang ditentukan oleh pihak bank. Berbeda dengan sistem perbankan dari Negara Barat, sistem perbankan dengan syariat Islam berprinsip pada saling mempercayai antara pelaku ekonomi sehingga apabila mendapatkan keuntungan ataupun kerugian akibat jalinan kerjasama akan ditanggung bersama (Koesoemowidjojo, 2000).

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariat Islam. *Baitul Maal wa Tamwil* atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi:

- 1) *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

- 2) *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya<sup>10</sup>.

Salah satu *Baitul Maal wa Tamwil* yang merupakan bagian dari CSR suatu perusahaan adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Swadaya Pribumi. BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro yang berbasis *syari'ah* yang dibentuk secara bersama oleh pihak *Community Relation* PT Holcim Indonesia Tbk dan tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal. BMT Swadaya Pribumi memiliki dua jenis produk, yaitu produk pembiayaan (*murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah*) dan produk simpanan (simpanan swadaya pribumi, simpanan pendidikan, simpanan Idul Fitri, simpanan *qurban*, dan simpanan berjangka *mudharabah*).

### Tujuan ke-3 MDGs

MDGs memiliki delapan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015, diantara kedelapan tujuan tersebut terdapat tujuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, yaitu tujuan pertama sampai dengan tujuan keenam. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih spesifik diuraikan pada tujuan ketiga MDGs: mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Meskipun telah banyak pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih ada dalam sebagian besar bidang (UNDP Indonesia, 2007). Perempuan dan laki-laki memang berbeda, namun tidak untuk dibedakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender diantaranya dengan menghilangkan ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan di sektor formal maupun informal, dan berbagai kegiatan atau program lainnya, termasuk program CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal PT Hocim Indonesia Tbk.

### Definisi Gender

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender menurut Hubeis (2010) adalah:

*"Suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik, dan ekonomi sehingga tidak bersifat kodrati atau mutlak".*

Menurut Simatauw *et al.* (2001) gender dan jenis kelamin (*sex*) memiliki konsep yang berbeda. Gender merupakan bentukan manusia yang tidak mutlak dan dapat berubah tergantung situasi, kondisi, dan waktu, serta dipengaruhi oleh budaya dan kehidupan sosial, seperti perempuan memasak, mengurus rumahtangga, mengurus anak, dan kegiatan lainnya. Sedangkan jenis kelamin (*sex*) merupakan sesuatu yang bersifat kodrat yang tidak dapat diubah, seperti perempuan menstruasi, hamil, menyusui, dan ciri-ciri biologis perempuan lainnya. Laki-laki menghamili, memiliki sperma, dan ciri-ciri biologis lainnya. WHO (2011) memberi batasan gender sebagai<sup>11</sup>:

*"Gender refers to the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women".* (Gender mengacu pada seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi perempuan dan laki-laki, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat).

### Kesetaraan dan Keadilan Gender

Instruksi Presiden dalam Pedoman PUG dalam Pembangunan Nasional mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain (Simatauw *et al.* 2001):

- 1) Marjinalisasi (peminggiran) ekonomi  
Lemahnya kesempatan perempuan meliputi akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti tanah, kredit, pasar. Perempuan dipinggirkan dalam berbagai kegiatan yang lebih memerlukan laki-laki.
- 2) Subordinasi (penomorduaan)  
Keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih baik, lebih penting, atau lebih diutamakan dibandingkan jenis kelamin yang lain. Terdapat batasan-batasan yang berasal dari kultural, agama, atau kebijakan terhadap perempuan dalam melakukan sesuatu. Perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dengan dirinya. Perempuan diharuskan tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan (*secondary breadwinner*).
- 3) Beban kerja berlebih (*over burden*)

<sup>10</sup> Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. Tata Cara Pendirian BMT. [Internet]. [diunduh 3 Januari 2012]. Format/Ukuran: PDF/ 470KB. Dapat diunduh dari: [http://pkesinteraktif.pkes.org/download/bmt\\_pkes\\_secure.pdf](http://pkesinteraktif.pkes.org/download/bmt_pkes_secure.pdf)

<sup>11</sup>[WHO] World Health Organization. 2011. What do we mean by "sex" and "gender"?. [Internet]. [dikutip 18 Mei 2011]. Dapat diunduh dari: <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>

Pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat, dan politik masyarakat. Perempuan biasanya memiliki tiga peran (*triple role*), yaitu produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat. Perempuan lebih dominan pada tiga peran tersebut sedangkan laki-laki lebih dominan pada peran produktif dan politik masyarakat.

4) Cap-cap negatif (*stereotype*)

Pelabelan negatif pada salah satu jenis kelamin, umumnya perempuan. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang emosional, tidak rasional, lemah, dan lainnya. Padahal laki-laki juga dapat berperilaku seperti itu. Pelabelan negatif dapat melahirkan ketidakadilan yang merugikan dan berdampak buruk pada salah satu pihak.

5) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Bentuknya bermacam-macam dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan terjadi akibat dari adanya konstruksi sosial yang sering dibudayakan di dalam masyarakat.

### Peran (Pembagian Kerja) Gender

Peran perempuan dan laki-laki diklasifikasikan dalam tiga jenis peran, yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial. Menurut Simatauw *et al.* (2001) peran produktif adalah kegiatan yang menghasilkan uang atau menghasilkan barang-barang lainnya yang tidak dikonsumsi atau digunakan sendiri, misalnya bertani, beternak, berburu, menjadi buruh, berdagang.

Peran reproduktif adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya merawat dan mengurus keperluan keluarga seperti, merawat anak, mengambil air, memasak (Simatauw *et al.* 2001). Peran sosial terdiri dari peran merawat masyarakat dan politik masyarakat. Peran merawat masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya menjalin kebersamaan, solidaritas antar masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, seperti arisan, pengajian, upacara adat. Peran politik masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seperti pemilihan kepala desa, rapat pembagian tanah, dan lain-lain (Simatauw *et al.* 2001).

### Analisis Gender dalam CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Definisi analisis gender dalam Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah:

*“Proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber-sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor*

*lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa”.*

Analisis gender merupakan suatu alat kunci bagi *gender mainstreaming*<sup>12</sup> untuk memperoleh pemahaman lebih mengenai lingkungan, dampak dan manfaat dari suatu kegiatan, dan prakarsa pemberdayaan masyarakat bagi perempuan dan laki-laki. Analisis gender menjadi himpunan dan analisis informasi dan data mengenai: 1) Peran, kewajiban, dan hak-hak berbeda bagi perempuan dan laki-laki; 2) Kebutuhan, prioritas, peluang, dan hambatan berbeda bagi perempuan dan laki-laki; 3) Alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut; dan 4) Peluang-peluang serta strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender<sup>13</sup>.

Terdapat lima komponen kunci dalam analisis gender tersebut, yaitu:

- a. Data yang dipilah-pilah berdasarkan jenis kelamin: data sosial-ekonomi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan variabel demografis, seperti umur, kelompok sosial, dan etnis (kuantitatif maupun kualitatif),
- b. Analisis pembagian tugas: apa, dimana, kapan, dan berapa banyak yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan untuk menggambarkan tuntutan yang berbeda-beda terhadap waktu dan tenaga perempuan dan laki-laki, berapa pekerjaan mereka dihargai, pola kerja musiman dan strategi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,
- c. Analisis akses dan kontrol,
- d. Analisis kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis,
- e. Analisis konteks sosial: meneliti dan memahami konteks sosial setempat (hukum, sosio-kultural, agama, institusi, kebijakan pemerintah) yang mempengaruhi peran dan hubungan gender<sup>14</sup>.

Teknik analisis gender yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Model Harvard

Model Harvard dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development* bekerjasama dengan Kantor *Women in Development* (WID)-USAID. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar (Dephut, 2004). Komponen dasar dalam model Harvard, yaitu:

- a. Profil kegiatan (produktif, reproduktif, dan sosial) yang didasarkan pada pembagian kerja dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin,

<sup>12</sup> “*Gender mainstreaming*” adalah proses penilaian dampak dari setiap tindakan yang terencana terhadap perempuan dan laki-laki.

<sup>13</sup> Sophie Dowling. 2008. Analisis Gender: Sebuah Panduan Pengantar Disiapkan untuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) Mitra Proyek. (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Aria Jalil). [Internet]. [diunduh 30 April 2011]. Format/ Ukuran: PDF/ 431 KB. Dapat diunduh dari: [empoweringcommunities.anu.edu.au/.../Gender%20Analysis%20Toolkit%20Bahasa%20Version.pdf](http://empoweringcommunities.anu.edu.au/.../Gender%20Analysis%20Toolkit%20Bahasa%20Version.pdf)

<sup>14</sup> Ibid. h. 7-8.

- b. Profil akses dan kontrol,
- c. Faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol,
- d. Analisis siklus proyek.

## 2) Model Moser

Teknik analisis Moser adalah suatu teknik analisis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan (reproduksi, produksi, sosial-kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis (Handayani dan Sugiarti, 2008). Model Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat 'teknis dan politis', kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu 'debat'. Terdapat kelemahan dalam model ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki (Dephut, 2004). Komponen dasar model Moser adalah:

- a. Tiga peran gender,
- b. Kontrol dan pengambilan keputusan,
- c. Kebutuhan strategis dan praktis gender,
- d. Matriks *Women In Development* (WID) dan *Gender And Development* (GAD),
- e. Pelibatan organisasi untuk pemastian pemasukan kebutuhan strategis gender dan kebutuhan praktis gender.

Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan dasar atau hidup, seperti pangan, air, tempat tinggal, air, sandang, penghasilan, dan perawatan kesehatan sedangkan kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan akan kesetaraan dan pemberdayaan, seperti pemerataan tanggung jawab dan pengambilan keputusan, akses pendidikan dan pelatihan yang sama<sup>15</sup>.

### Kerangka Pemikiran

Pihak Comrel Holcim menyatakan BMT Swadaya Pribumi sebagai salah satu program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yang telah berhasil dan berkelanjutan. Salah satu cara meninjau apakah suatu program telah berhasil atau tidak adalah melalui ada atau tidaknya pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender (Lu'lu, 2005).

BMT Swadaya Pribumi merupakan salah satu bentuk upaya memberdayakan ekonomi lokal masyarakat sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pembiayaan berupa pinjaman (kredit) yang diberikan kepada peserta produk pembiayaan agar dapat meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usaha sehingga pemenuhan kebutuhan

ekonomi dapat terpenuhi. Menurut Anwar (1997) dalam Koesoemowidjojo (2000) upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi sangat ditentukan oleh peranan gender.

Analisis gender yang dapat dilihat dari data terpilah gender antara perempuan dan laki-laki, diantaranya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender<sup>16</sup>. Analisis gender dalam BMT Swadaya Pribumi dilihat dari data terpilah peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi (tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan) dan karakteristik demografi (umur dan status perkawinan) peserta perempuan dan peserta laki-laki. Karakteristik individu terpilah antara peserta perempuan dan peserta laki-laki tersebut merupakan faktor internal yang berasal dari diri individu masing-masing yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.

Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dianalisis dengan melihat dan mengukur akses atau peluang peserta produk pembiayaan terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan) dari BMT Swadaya Pribumi, kontrol atau kuasa peserta produk pembiayaan terhadap sumberdaya (pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan) dari BMT Swadaya Pribumi, dan manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi (peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemampuan berwirausaha) yang dirasakan peserta produk pembiayaan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Semakin tinggi tingkat akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati peserta produk pembiayaan, maka kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender.

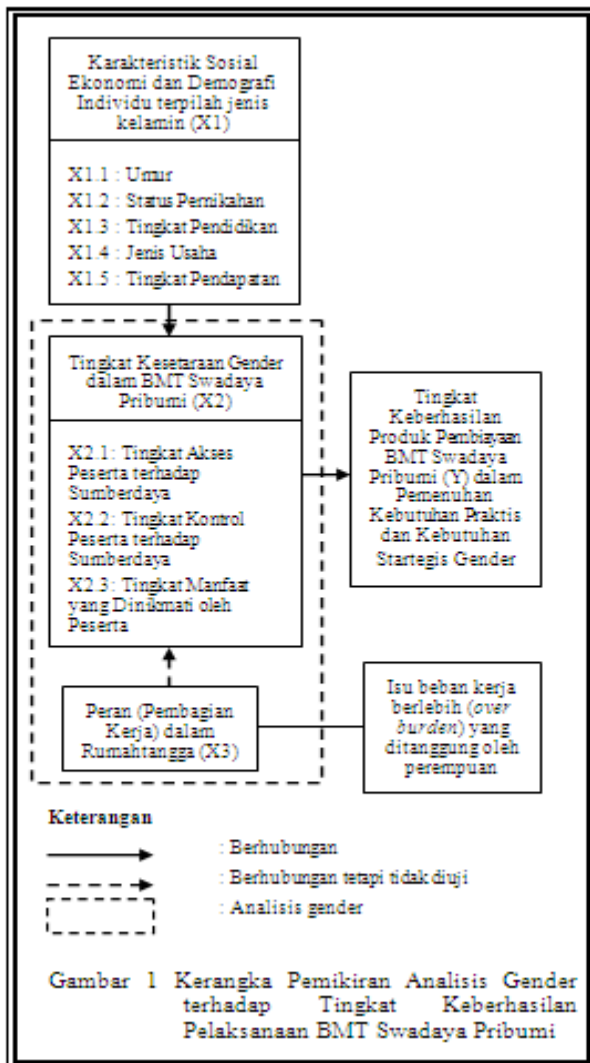
Peran (pembagian kerja) di dalam rumahtangga peserta produk pembiayaan diukur berdasarkan jumlah kegiatan (produktif, reproduktif, dan sosial-kemasyarakatan) yang dilakukan oleh setiap pekerja keluarga (perempuan dan laki-laki). Perempuan memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan tidak hanya mengerjakan kegiatan reproduktif dan kegiatan sosial-kemasyarakatan tetapi juga turut serta dalam mengerjakan kegiatan produktif di sela waktu istirahat mereka. Perempuan umumnya membantu suami mereka mencari nafkah dengan berdagang di sekitar rumah. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perempuan dalam mengerjakan kegiatan mengurus rumahtangga dan mencari nafkah secara bersamaan. Peran (pembagian kerja) tidak dihubungkan dengan keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dengan pertimbangan peran dalam rumahtangga merupakan variabel diluar kegiatan pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, namun analisis terhadap peran (pembagian kerja) dalam rumahtangga peserta tetap dilakukan untuk

<sup>15</sup> Neleni Haspels dan Busakorn Suriyasan. 2005. Panduan Praktis bagi Organisasi: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. [Internet]. [diunduh 10 Mei 2011]. Format/ Ukuran: PDF/808 KB. Dapat diunduh dari: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms\\_150508.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_150508.pdf)

<sup>16</sup> [ILO] International Labour Organization. 2001. Strategi Pengarusutamaan Gender. [Internet]. [dunduh 28 April 2010]. Dapat diunduh dari: [www.ilo.org](http://www.ilo.org).

melihat isu beban kerja berlebih (*over burden*) yang dialami salah satu pihak, umumnya perempuan.

Kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi mempengaruhi keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Keberhasilan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dalam penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender yang dirasakan oleh peserta produk pembiayaan perempuan dan laki-laki. Ketika kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta perempuan dan peserta laki-laki terpenuhi, maka pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dan dapat dikatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah responsif gender.



### Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara karakteristik individu peserta terpilah berdasarkan jenis kelamin dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
  - a. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara umur peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.

- b. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara status pernikahan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
- c. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat pendidikan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
- d. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara jenis usaha yang ditekuni peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.
- e. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat pendapatan peserta dengan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi.

2) Perempuan memiliki beban kerja berlebih (*over burden*) yang ditunjukkan melalui peran (pembagian kerja) dalam rumah tangga peserta BMT Swadaya Pribumi.

3) Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.

- a. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat akses peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
- b. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat kontrol peserta terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.
- c. Terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati oleh peserta dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi.

### PENDEKATAN LAPANGAN

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Bogor yang merupakan kawasan Ring 1 penerima program CSR PT Holcim Indonesia Tbk, salah satunya program pembiayaan usaha mikro dari *Baitul Maal wa Tamwil* Swadaya Pribumi. Penjajagan lokasi penelitian dilakukan pada bulan Juli-Oktober dan penelitian dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan November akhir tahun 2011.

#### Teknik Penarikan Contoh

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kembang Kuning yang menjadi peserta program BMT Swadaya Pribumi yang berjumlah 317 orang. Dari populasi tersebut, dibentuklah kerangka sampling yang berjumlah 66 orang yang merupakan masyarakat Desa Kembang Kuning yang menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi dan berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Kemudian ditentukanlah sampel penelitian yang berjumlah 30 responden yang diambil secara acak non-proposional

(*non-proportional random sampling*) dan terdiri atas 15 orang responden laki-laki dan 15 responden perempuan. Pemilihan informan kunci dan informan lainnya dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan teknik bola salju.

### Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen atau arsip. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survai dan didukung pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Adapun penelitian survai pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang disebut juga sebagai penelitian penjelasan atau *explanatory research* (Singarimbun dan Effendi, 2008).

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh secara kualitatif dari lapangan, seperti data gambaran umum lokasi penelitian Desa Kembang Kuning dan gambaran umum BMT Swadaya Pribumi dideskripsikan ke dalam bentuk tabel serta diinterpretasikan.

Data primer dari lapangan melalui proses pengeditan informasi yang sesuai dengan yang diteliti, kemudian data kuantitatif tersebut dikode, diberikan skor, dan di *entry* ke dalam *Microsoft excel 2007* dan *software SPSS Statistic 17.00*. Data kuantitatif tersebut kemudian diolah dengan menggunakan tabulasi silang untuk menyajikan gambaran hubungan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dengan karakteristik peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi, dan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Selanjutnya, data kuantitatif yang ditampilkan ke dalam tabulasi silang diuji dengan uji statistik non-parametrik *Chi Square* untuk data skala minimal nominal pada taraf nyata ( $\alpha$ )=0,05 dan uji korelasi *Rank Spearman* untuk data dengan skala minimal ordinal pada taraf nyata ( $\alpha$ )=0,05. Tanda bintang (\*) yang terdapat pada nilai korelasi koefisien juga menunjukkan signifikansi atau hubungan antar variabel. Semakin banyak jumlah bintang (\*) pada koefisien korelasi maka semakin tinggi tingkat signifikansi atau hubungan antar variabel.

## GAMBARAN UMUM BMT SWADAYA PRIBUMI

### Sejarah Singkat BMT Swadaya Pribumi

BMT Swadaya Pribumi lahir dari inisiatif Dharmawan Reksodiputro, manajer *Community Relations Departement*, PT Holcim Indonesia Tbk. *Community Relations Departement* bekerjasama dengan para tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Tanggal 9 Juni 2006, tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 43 orang diundang oleh PT Holcim Indonesia Tbk untuk sosialisasi pentingnya pembentukan BMT Swadaya Pribumi. Setelah disepakati oleh pihak Holcim serta para tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal

maka pada tanggal 9 Juni 2006 berdirilah BMT Swadaya Pribumi dengan modal awal sebesar Rp201.000.000,00.

Awal pembentukannya, BMT Swadaya Pribumi menemui beberapa kendala, salah satunya adalah terdapat peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang menunggak pembayaran angsuran, seperti yang diungkapkan oleh manajer BMT Swadaya Pribumi sebagai berikut:

*"Pada awal terbentuk BMT Swadaya Pribumi, kendala yang dihadapi masih besar. Dua tahun pertama berdiri masyarakat peserta pembiayaan masih sering menunggak pembayaran dari pembiayaan karena mereka beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana dari perusahaan jadi tidak apa-apa jika tidak dikembalikan..."*

Kendala tersebut masih ditemukan pada beberapa peserta produk pembiayaan hingga saat ini, namun berjalannya waktu dan berkat dukungan berbagai pihak, BMT Swadaya Pribumi dapat terus berkembang. Memasuki usianya yang keempat BMT Swadaya Pribumi mencatat aset sebesar Rp2.910.000.000,00 dengan jumlah nasabah mencapai 2.500 orang. Adapun pembiayaan yang terserap oleh masyarakat mencapai Rp1.900.000.000,00 dengan penerima manfaat pembiayaan mencapai 1.300 nasabah (Sumber: Data sekunder BMT Swadaya Pribumi, 2011).

### Visi dan Misi BMT Swadaya Pribumi

Visi BMT Swadaya Pribumi yakni menjadi lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang profesional, kokoh, bermanfaat, dan amanah dalam menumbuhkembangkan ekonomi umat berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Sedangkan misi BMT Swadaya Pribumi, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya ekonomi kecil.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan penghasilan masyarakat.
3. Menghimpun dan mengelola dana masyarakat sehingga memiliki nilai tambah bagi orang lain.
4. Membebaskan masyarakat kecil dari riba dan rentenir.

### Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi terdiri dari empat jenis produk, yaitu:

1. *Murabahah*

Akad jual beli suatu barang dimana BMT Swadaya Pribumi (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). *Murabahah* sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat ia kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta pada BMT Swadaya Pribumi agar membiayai



pembelian barang tersebut dan nasabah membayarnya secara angsuran.

## 2. *Mudharabah*

Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) dimana BMT Swadaya Pribumi menyediakan modal (100%), sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama berupa nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad perjanjian. *Mudharabah* sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk pengembangan usaha perdagangan atau jasa.

## 3. *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa/jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* bisa digunakan bagi nasabah yang kekurangan dana untuk menyewa bangunan (misal: ruko), biaya sekolah, biaya berobat, dan lain-lain yang harus dibayar secara tunai tanpa diangsur. Nasabah meminta BMT Swadaya Pribumi untuk membayarnya secara tunai dan nasabah tersebut mengangsurkannya ke BMT Swadaya Pribumi.

## 4. *Musyarakah*

Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu proyek dimana nasabah dan BMT Swadaya Pribumi sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan BMT Swadaya Pribumi.

## Produk Simpanan

### 1. Simpanan Swadaya Pribumi (Swami)

Merupakan simpanan investasi yang mudah dan sesuai *syari'ah*. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana sewaktu-waktu dengan mudah. Swami menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan bagi hasil yang adil, halal, dan sesuai *syari'ah*. Setoran awal minimal Rp25.000,00.

### 2. Simpanan Pendidikan (Sipendi)

Merupakan simpanan untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putri nasabah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum tahun ajaran baru. Setoran awal Rp25.000,00.

### 3. Simpanan Idul Fitri (Sifitri)

Merupakan simpanan khusus untuk persiapan kebutuhan keuangan yang meningkat ketika menghadapi Idul Fitri. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum Idul Fitri. Setoran awal Rp25.000,00.

### 4. Simpanan Qurban (Siqur)

Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berqurban pada Idul Adha. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum Idul Adha. Setoran awal Rp25.000,00.

### 5. Simpanan berjangka *mudharabah*

Simpanan ini sama dengan simpanan Swami, namun penarikannya dibatasi jangka waktu tertentu. Setoran minimal Rp5.000.000,00. Porsi atau nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktunya.

## Kepedulian Sosial

BMT Swadaya Pribumi bekerjasama dengan PT Holcim Indonesia Tbk melalui *Community Relations Departement* terus berusaha aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, sampai bidang pendidikan. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang tercatat sebagai warga desa binaan PT Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Narogong. Salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama dengan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil memulai program Pemberian Pembiayaan *Qordhul Hasan* (kebajikan atau tanpa bagi hasil) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan. Besar pembiayaan Rp500.000,00 s.d Rp1.000.000,00. Selain itu BMT Swadaya Pribumi juga terlibat dalam program:

#### 1. Pengadaan bazar sembako murah.

Program kepedulian sosial berupa bazar sembako murah diadakan setiap menjelang bulan Ramadhan dengan menawarkan kepada para nasabah produk simpanan, peserta produk pembiayaan, serta masyarakat non-nasabah yang berlokasi di sekitar BMT Swadaya Pribumi sembako dengan harga murah (setengah harga dari harga di pasaran).

#### 2. Pemotongan hewan qurban.

#### 3. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat umum.

Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan oleh pihak *Community Relation* PT Holcim Indonesia Tbk di *Club House* PT Holcim Indonesia Tbk. Pelatihan kewirausahaan diadakan setiap tahunnya dengan materi dan narasumber yang berbeda. Pada tahun 2011, pelatihan kewirausahaan diadakan dua kali sebelum bulan Ramadhan dan dua kali setelah bulan Ramadhan.

#### 4. Pemberian sumbangan kegiatan masyarakat dan PHBI.

Pemberian sumbangan kegiatan masyarakat, diantaranya sumbangan pada saat acara 17 Agustusan.

#### 5. Pembinaan bagi nasabah pembiayaan.

#### 6. Pengajian bagi nasabah BMT Swadaya Pribumi.

(Sumber: Data sekunder BMT Swadaya Pribumi, 2011).

## Persyaratan

Sebagian besar responden menyatakan alasan mereka menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi adalah karena persyaratan pengajuan produk pembiayaan yang mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti yang diungkapkan responden berikut ini:

*“Ibu lebih milih ngajuin pembiayaan di BMT karena syaratnya yang mudah dan cepet cair uangnya...”* (Ibu Pn, 33 tahun)

*“Syarat di BMT mudah, tidak seperti di bank yang pengajuannya saja ribet, harus difoto-foto rumahnya, kasih jaminan, dan prosesnya juga lama...”* (Bapak Sl, 44 tahun)

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi anggota atau nasabah BMT Swadaya Pribumi. Adapun persyaratan untuk produk simpanan, yaitu:

1. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM dan identitas lainnya.
2. Mengisi formulir pembukaan simpanan.
3. Setoran awal mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. Bagi hasil atau nisbah sewaktu-waktu dapat berubah.

Sedangkan syarat untuk produk pembiayaan, yaitu:

1. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM dan identitas lainnya.
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
3. Menyerahkan jaminan berupa: surat kios, BPKB motor/mobil, akte jual beli tanah, sertifikat tanah atau rumah dan jaminan lainnya yang memenuhi aspek legal.

Beberapa responden menyatakan tidak menyerahkan surat jaminan ketika mengajukan produk pembiayaan, seperti yang diungkapkan responden berikut ini:

*“Syarat dapet pinjaman dari BMT mudah, asal nabung aja juga bisa ngajuin, ga kayak di bank-bank yang harus pake jaminan ini itu dan lama prosesnya...”* (Ibu Yn, 45 tahun)

Responden yang tidak menyerahkan surat jaminan pada saat pengajuan pembiayaan, umumnya kenal dan dekat dengan pengurus BMT Swadaya Pribumi sehingga melakukan perjanjian atas rasa percaya antara pengurus dan peserta. Peserta yang tidak menyerahkan surat jaminan juga memiliki tabungan di BMT Swadaya Pribumi sehingga menjadi peserta juga pada produk simpanan.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Individu Peserta

Peneliti mengkategorikan umur responden ke dalam dua kategori umur, yaitu umur 45 tahun ke bawah dan umur 45 tahun ke atas. Pengkategorian umur ini diperoleh dari nilai tengah (median) selang umur responden penelitian, yaitu  $44,5 \approx 45$  tahun. Sebagian besar responden laki-laki berumur 45 tahun ke bawah, yakni sebesar 66,7 persen dan hanya sebesar 33,3 persen responden laki-laki yang berumur lebih dari 45 tahun sedangkan sebagian besar responden perempuan berumur 45 tahun ke atas, yakni sebesar 66,7 persen dan hanya sebesar 33,3 persen responden perempuan yang berumur kurang dari 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berumur lebih muda daripada peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.

Pengkategorian umur yang dilakukan peneliti tidak hanya berdasarkan nilai tengah (median) dari selang umur responden. Pengkategorian umur juga dilakukan berdasarkan selang umur produktif bekerja yang ditetapkan oleh BPS, yaitu umur 15-64 tahun. Sebaran umur produktif bekerja terbesar pada responden laki-laki berada pada kategori umur produktif bekerja sedang di selang umur 32-48 tahun, yakni sebesar 66,7 persen sedangkan sebaran umur produktif bekerja terbesar pada responden perempuan berada pada kategori umur produktif bekerja tinggi di selang umur 49-64 tahun, yakni sebesar 46,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki relatif berumur produktif bekerja lebih muda daripada peserta perempuan.

Seluruh responden laki-laki pada penelitian ini berstatus sudah menikah dan mayoritas responden perempuan juga berstatus sudah menikah, yakni sebesar 86,7 persen. Hanya terdapat 13,3 persen responden perempuan yang berstatus janda. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, baik peserta laki-laki maupun peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berstatus sudah menikah.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terlihat bahwa responden laki-laki berada pada tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi daripada responden perempuan karena mayoritas responden laki-laki berada pada kategori pendidikan tinggi, yaitu tamat SMA sebesar 40 persen sedangkan sebagian besar responden perempuan berada pada kategori pendidikan rendah, yaitu tidak tamat atau tamat SD sebesar 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berpendidikan formal lebih tinggi daripada peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.

Seluruh responden pada penelitian ini merupakan pedagang atau wiraswasta yang memiliki jenis usaha yang beragam. Jumlah jenis usaha yang ditekuni oleh responden perempuan dan responden laki-laki adalah 21 jenis usaha. Jenis usaha warung nasi, gado-gado, gorengan, es campur, beras, dan klontong/warung dominan ditekuni oleh responden perempuan sedangkan jenis usaha ketoprak, sate, bakso keliling, bakso goreng, madu, mebel, minyak wangi, percetakan, pengumpul kain perca, dan pangkas rambut mayoritas merupakan jenis usaha yang ditekuni oleh responden laki-laki. Dari data tersebut terlihat kecenderungan jenis usaha yang ditekuni oleh

responden perempuan adalah jenis usaha makanan melalui kegiatan memasak yang pemasarannya dilakukan di rumah atau sekitar rumah sedangkan jenis usaha yang ditekuni responden laki-laki lebih beragam tidak hanya usaha makanan tetapi juga usaha non-makanan, seperti kerajinan mebel, percetakan, pengumpul kain perca yang omset per bulannya lebih besar daripada usaha makanan dalam skala kecil. Responden laki-laki yang menekuni usaha makanan memiliki kecenderungan menjual dagangan mereka dengan cara berkeliling sehingga memiliki peluang yang besar dalam memperoleh lebih banyak pembeli daripada hanya menjual makanan di rumah. Jenis usaha makanan dominan ditekuni oleh responden perempuan sedangkan jenis usaha non-makanan dominan ditekuni oleh responden laki-laki.

Pendapatan responden setiap bulannya relatif beragam dan tidak semua responden dapat mengatakan dengan jujur jumlah pendapatan mereka. Sebagian besar responden juga kesulitan dalam menyebutkan secara pasti nominal pendapatan mereka, seperti yang diungkapkan salah satu responden berikut ini:

*“ Duh neng, kalau pendapatan ibu setiap harinya mah ga tentu, bingung nyebutinnya juga berapa. Kadang ada, kadang juga sedikit hasilnya neng ... ”* (Ibu En, 49 tahun)

Berdasarkan kisaran pendapatan yang responden ungkapkan maka diperoleh data pendapatan terendah responden pada penelitian ini adalah Rp400.000,00 per bulan dan pendapatan tertinggi responden adalah Rp12.000.000,00. Dari hasil tersebut, peneliti membagi kategori pendapatan per bulan responden menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan Rp400.000,00-Rp4.500.000,00 per bulan, Rp4.500.000,00-Rp 8.600.000,00 per bulan, dan kurang dari Rp8.600.000,00 per bulan. Sebagian besar responden perempuan dan laki-laki berada pada kategori tingkat pendapatan Rp400.000,00-Rp4.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden, baik responden laki-laki maupun responden perempuan berpendapatan rendah dan jumlah responden laki-laki yang berpendapatan rendah lebih banyak daripada responden perempuan yang berpendapatan rendah. Hal yang menarik adalah bahwa jumlah responden perempuan yang berpendapatan tinggi (33,3%) lebih banyak dari responden laki-laki (6,7%).

### **Peran (Pembagian Kerja) dalam Rumahtangga Peserta**

Peran atau pembagian kerja tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi atau lingkup formal lainnya. Pembagian kerja juga terdapat dalam keluarga di suatu rumahtangga yang dilakukan oleh suami, istri, atau dibantu oleh anak. Pembagian kerja oleh perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga terbagi ke dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, dan kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Kegiatan produktif dalam penelitian ini diukur melalui satu kegiatan, yaitu kegiatan mencari nafkah. Kegiatan reproduktif dalam penelitian ini diukur melalui 12 kegiatan, yaitu memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, menyetrika, mengurus anak,

memandikan anak, menyuapi anak, menggendong anak, mengantar anak ke posyandu, dan memperbaiki perkakas rumahtangga. Kegiatan sosial-kemasyarakatan dalam penelitian ini diukur melalui enam kegiatan, yaitu arisan, kelompok pengajian, PKK, kerjabakti, kematian, dan pernikahan.

Jumlah seluruh kegiatan yang ditanyakan kepada responden adalah 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut ditanyakan kepada responden untuk mengetahui siapa yang mengerjakan apa di dalam rumahtangga dan masyarakat? apakah laki-laki saja, perempuan saja, bersama, atau dibantu oleh anak (perempuan dan laki-laki)? Pada kenyataannya terdapat kegiatan yang didominasi laki-laki atau perempuan saja, seperti kegiatan produktif biasanya di dominasi oleh kaum laki-laki dan kegiatan reproduktif didominasi oleh kaum perempuan saja. Dominasi tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian kegiatan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi timbulnya persepsi mengenai jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, diantaranya hukum, sosio-kultural, agama, institusi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

Kegiatan produktif melalui kegiatan mencari nafkah utamanya dikerjakan secara bersama oleh suami dan istri dalam rumahtangga (50,0%), kedua dikerjakan oleh laki-laki saja (33,3%), dan ketiga dikerjakan oleh perempuan saja (16,7%). Kegiatan reproduktif atau kegiatan mengurus rumahtangga dan keluarga yang bersifat domestik dominan dikerjakan oleh perempuan, seperti kegiatan memasak (100,0%), mencuci pakaian (93,3%), mencuci piring (96,7%), menyapu (80,0%), mengepel (80,0%), menyetrika (80,0%), mengurus anak (70,0%), memandikan anak (93,3%), menyuapi anak (90,0%), menggendong anak (80,0%), dan mengantar anak ke posyandu (96,7%). Hanya kegiatan memperbaiki perkakas rumahtangga yang dominan dikerjakan oleh laki-laki (76,7%). Sebagian besar responden laki-laki mengatakan bahwa pekerjaan rumahtangga lebih banyak dikerjakan oleh istri mereka, seperti yang diungkapkan salah satu responden berikut ini:

*“Memasak, mencuci piring, dan pekerjaan rumah mah dikerjakan oleh istri saya, saya hanya bantu-bantu menjaga anak seperti sekarang ini saja mba...”* (Bpk En, 40 tahun).

Kegiatan sosial sebagian besar dikerjakan secara bersama oleh perempuan dan laki-laki. Kegiatan arisan dan PKK dominan dikerjakan oleh perempuan sedangkan kegiatan kerjabakti dominan dikerjakan oleh laki-laki. Beberapa responden mengatakan bahwa di lokasi penelitian ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah jarang dilakukan atau tidak dilakukan pada saat ini.

*“Dulu saya masih tergabung dalam ibu-ibu PKK, tapi sekarang mah PKK-nya juga sudah tidak aktif lagi seperti dulu mba...”* (Ibu Wln, 47 tahun).

Banyaknya kegiatan yang dilakukan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki beban kerja yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain mengerjakan kegiatan rumahtangga, mengurus keluarga,

dan mengikuti kegiatan sosial, perempuan juga turut serta bekerja mencari nafkah tambahan untuk menopang perekonomian keluarga sehingga waktu istirahat perempuan menjadi lebih sedikit.

*“Setiap harinya Ibu bangun jam 2 pagi untuk memasak makanan yang dijual pagi harinya, neng. Pagi-pagi berangkat ke sekolah untuk jualan. Siangnya menjaga warung dirumah dan beres-beres rumah...”* (Ibu Rhy, 46 tahun).

### **Analisis Gender terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan BMT Swadaya Pribumi**

Tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi dianalisis menggunakan alat analisis yang disebut analisis gender. Analisis gender pada penelitian ini dianalisis berdasarkan tingkat akses peserta perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, tingkat kontrol peserta perempuan dan peserta laki-laki terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi, serta tingkat manfaat yang dinikmati oleh perempuan dan laki-laki peserta BMT Swadaya Pribumi.

Akses peserta terhadap sumberdaya merupakan salah satu alat dalam menganalisis tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Akses terhadap sumberdaya merupakan peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya. Pada penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud terdiri dari modal uang, pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh PT Holcim Indonesia Tbk dan BMT Swadaya Pribumi, serta pendampingan usaha oleh BMT Swadaya Pribumi. Dari segi akses, baik responden laki-laki maupun responden perempuan sama-sama memiliki tingkat akses yang tinggi terhadap sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi, namun jumlah responden laki-laki yang memiliki akses tinggi untuk memperoleh sumberdaya dalam BMT Swadaya Pribumi 6,7 persen lebih banyak daripada jumlah responden perempuan yang memiliki akses tinggi terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi.

Kontrol peserta terhadap sumberdaya merupakan kendali atau kuasa yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya. Pada penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud dalam kontrol peserta adalah modal yang mereka terima dari BMT Swadaya Pribumi dan usaha yang mereka tekuni. Dari segi kontrol, responden laki-laki berada pada kategori tinggi pada kontrol dalam memperoleh sumberdaya (93,3%) sedangkan responden perempuan berada pada kategori rendah dalam memperoleh sumberdaya (66,7%) sehingga dapat dikatakan bahwa peserta laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar daripada peserta perempuan untuk menentukan besarnya pinjaman, pemanfaatan dari uang pinjaman, jenis usaha, wewenang terhadap usaha yang ditekuni, serta memiliki kendali atas segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang ditekuni.

Dari segi manfaat yang dinikmati peserta, sebagian besar responden perempuan merasa dirinya memperoleh manfaat yang tinggi dari BMT Swadaya Pribumi (60,0%) sedangkan sebagian besar responden laki-laki merasa memperoleh manfaat yang rendah dari BMT Swadaya

Pribumi (66,7%). Sebesar 53,3 persen peserta, baik peserta laki-laki maupun perempuan menyatakan manfaat yang dinikmati dari BMT Swadaya Pribumi rendah. Responden perempuan menikmati peningkatan pendapatan yang mereka peroleh walaupun jumlah peningkatannya tidak besar dan belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Berbeda dengan responden perempuan, sebagian besar responden laki-laki merasa keadaan mereka sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan berjalan sama saja dan tidak ada perubahan yang lebih baik. Sebagian besar responden laki-laki menjawab tidak merasakan adanya peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, dan peningkatan pengetahuan kewirausahaan setelah menjadi peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan ukuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh peserta perempuan dan peserta laki-laki.

Tingkat kesetaraan gender diperoleh dari akumulasi nilai responden mengenai akses terhadap sumberdaya BMT Swadaya Pribumi, kontrol terhadap sumberdaya BMT Swadaya Pribumi, dan manfaat yang dinikmati oleh peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Responden laki-laki maupun responden perempuan sama-sama menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender di BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun jumlah responden perempuan yang menyatakan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi lebih sedikit daripada responden laki-laki dengan selisih 26,7 persen. Hanya 73,3 persen responden perempuan yang menyatakan setara sedangkan seluruh responden laki-laki menyatakan tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi telah setara gender. Hal ini dipengaruhi oleh nilai akses dan kontrol yang rendah dari responden perempuan dalam hal pengelolaan dana pembiayaan dan pengelolaan usaha sehingga terdapat 26,7 persen responden perempuan yang menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi tidak setara gender. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih setara gender dalam BMT Swadaya Pribumi daripada peserta perempuan.

### **Analisis Hubungan Karakteristik Individu dengan Kesetaraan Gender dalam BMT Swadaya Pribumi**

Peserta perempuan dan peserta laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda. Dari segi umur, peserta laki-laki berumur produktif bekerja yang lebih muda daripada peserta perempuan sehingga peserta laki-laki cenderung menekuni usaha berdagang pada usia produktif muda sedangkan peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi berumur produktif bekerja tua. Peserta berumur muda menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi tinggi. Peserta yang berumur muda merupakan karakteristik dari peserta laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati yang lebih besar daripada peserta perempuan.

Dari segi pendidikan, peserta perempuan menempuh tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada peserta laki-laki. Peserta perempuan hanya menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) sedangkan

peserta laki-laki telah mencapai pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Perempuan yang berpendidikan rendah cenderung memiliki posisi tawar yang lemah dalam keluarganya sehingga sulit memutuskan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan peserta maka semakin tinggi tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Pendidikan yang tinggi merupakan karakteristik dari peserta laki-laki sehingga peserta laki-laki memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta perempuan.

Dari segi status pernikahan, sebagian besar peserta laki-laki maupun peserta perempuan telah berstatus menikah hanya sebagian kecil peserta yang berstatus janda. Peserta yang berstatus menikah tidak memiliki kuasa atau kendali yang bebas seperti pada saat dia berstatus belum menikah atau berstatus cerai. Laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga cenderung dominan dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, perempuan yang ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari suami mereka. Peserta perempuan yang berstatus janda memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta yang berstatus berkeluarga.

Dari segi jenis usaha, peserta perempuan cenderung menekuni usaha makanan skala kecil yang dapat dikerjakan di rumah sambil mengurus dan merawat keluarga (domestik) seperti membuka warung di depan rumah, berjualan gado-gado, es campur, dan jenis usaha makanan lainnya di rumah. Berbeda dengan peserta perempuan, peserta laki-laki menekuni jenis usaha yang lebih beragam. Tidak hanya jenis usaha makanan tetapi juga jenis usaha non-makanan, seperti percetakan, mebel, dan lain-lain yang menghasilkan omset lebih besar daripada jenis usaha makanan dalam skala kecil. Peserta laki-laki yang menekuni jenis usaha makanan cenderung menjual dagangan mereka dengan cara berkeliling, seperti ketoprak keliling, baso keliling, dan lain-lain. Sehingga peserta laki-laki yang menekuni jenis usaha makanan dengan cara berkeliling memiliki lebih besar peluang dalam memperoleh pembeli daripada hanya berjualan di depan rumah. Peserta yang menekuni usaha jenis non-makanan menyatakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi lebih tinggi daripada peserta yang menekuni jenis usaha makanan. Jenis usaha non-makanan menjadi karakteristik jenis usaha yang ditekuni oleh peserta laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peserta laki-laki memiliki akses yang besar terhadap sumberdaya, kontrol yang besar terhadap sumberdaya, dan manfaat yang dinikmati lebih besar daripada peserta perempuan.

Dari segi pendapatan, peserta perempuan dan peserta laki-laki sama-sama berada pada kategori pendapatan yang rendah. Pendapatan tinggi biasa dimiliki oleh peserta yang memiliki usaha dalam skala besar dan memiliki lebih dari satu jenis usaha dengan manajemen keuangan yang baik.

Tiga dari enam karakteristik individu peserta yang berbeda memiliki hubungan dengan kesetaraan gender

dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Tiga karakteristik individu peserta tersebut adalah umur berdasarkan median selang umur responden, umur berdasarkan umur produktif bekerja dari BPS, dan jenis usaha yang ditekuni oleh peserta. Umur peserta menunjukkan koefisien korelasi yang negatif, yaitu semakin muda umur peserta maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi. Sedangkan karakteristik lainnya, yaitu status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pendapatan menunjukkan nilai koefisien yang positif.

### **Analisis Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi**

Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi pada penelitian ini diukur dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan praktis serta kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan (perempuan dan laki-laki) dipertimbangkan dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi. Berdasarkan kebutuhan praktis gender, sebagian besar responden laki-laki berada pada kategori rendah dalam pemenuhan kebutuhan praktis (53,3%) sedangkan sebagian besar responden perempuan berada pada kategori tinggi dalam pemenuhan kebutuhan praktis (66,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan merasa kebutuhan praktis mereka, seperti pemenuhan kebutuhan permodalan, pengetahuan kewirausahaan, kebutuhan ekonomi, perbaikan kondisi hidup, dan perkembangan usaha. Hal ini juga berhubungan dengan tingginya tingkat pemenuhan manfaat yang dirasakan oleh responden perempuan.

Berdasarkan kebutuhan strategis gender, sebagian besar responden perempuan berada pada kategori rendah dalam pemenuhan kebutuhan strategis (60,0%) sedangkan sebagian besar responden laki-laki berada pada kategori tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis (86,7%), dengan selisih perbedaan 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden laki-laki merasa kebutuhan strategis mereka, seperti kesempatan memperoleh pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pengambilan keputusan dalam rumahtangga telah terpenuhi.

Penggabungan pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender antara peserta perempuan dan peserta laki-laki dapat mengukur tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender para peserta produk pembiayaan. Secara kuantitatif, jawaban sebagian besar responden perempuan dan responden laki-laki mengenai keberhasilan BMT Swadaya Pribumi sama-sama menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi berada pada kategori tinggi karena telah berhasil memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi. Hanya sebesar 13,3 persen peserta perempuan dan 13,3 persen peserta laki-laki yang merasa tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis mereka tergolong rendah.

Kuantitas peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang lebih banyak dari peserta laki-laki menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan

yang cukup besar untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Swadaya Pribumi, namun peserta perempuan memiliki kontrol atau kuasa yang lebih rendah daripada peserta laki-laki dalam mengelola uang pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi serta dalam mengelola usaha yang mereka jalani karena laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam rumahtangga peserta sehingga laki-laki mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang mempengaruhi peserta perempuan menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam BMT Swadaya Pribumi adalah tidak setara gender. Dari segi akses dan kontrol, peserta laki-laki memiliki akses yang lebih tinggi daripada peserta perempuan, namun dari segi manfaat yang dirasakan, peserta perempuan menyatakan manfaat yang mereka nikmati adalah tinggi. Manfaat peserta perempuan yang tinggi tersebut mempengaruhi keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan. Tingkat kesetaraan gender yang setara dalam BMT Swadaya Pribumi mempengaruhi tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi. Keberhasilan BMT Swadaya Pribumi sebagai suatu program yang responsif gender merupakan keterlibatan aktif dari semua pihak, peserta perempuan dan peserta laki-laki harus menyadari kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing.

## KESIMPULAN

- 1) Peserta perempuan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memiliki karakteristik, yaitu: berumur tua, mayoritas peserta perempuan berstatus sudah menikah dan minoritas peserta perempuan berstatus janda, berpendidikan rendah, dominan menekuni jenis usaha makanan, serta berpendapatan rendah. Peserta laki-laki produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi memiliki karakteristik, yaitu: berumur muda, berstatus sudah menikah, berpendidikan tinggi, dominan menekuni jenis usaha non-makanan, serta berpendapatan rendah. Tiga dari enam karakteristik individu peserta, yaitu umur berdasarkan median selang umur responden, umur berdasarkan umur produktif bekerja dari BPS, dan jenis usaha yang ditekuni oleh peserta berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.
- 2) Perempuan mengerjakan lebih banyak kegiatan reproduktif dan kemasyarakatan, serta memiliki beban kerja berlebih (*over burden*) karena disamping bekerja untuk merawat dan mengurus keluarga, serta mengikuti kegiatan sosial-kemasyarakatan, sebagian besar perempuan juga membantu menopang perekonomian keluarga dengan mencari nafkah.
- 3) Baik peserta laki-laki maupun peserta perempuan sama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender, namun persentase peserta laki-laki yang menyatakan pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah setara gender lebih tinggi daripada peserta perempuan. Hal ini dikarenakan peserta laki-laki memiliki akses terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi dan kontrol terhadap sumberdaya dari BMT Swadaya Pribumi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh peserta perempuan.
- 4) Secara kuantitatif, peserta perempuan dan peserta laki-laki menyatakan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender peserta produk pembiayaan. Namun, peserta perempuan merasakan pemenuhan kebutuhan strategis yang lebih rendah daripada peserta laki-laki dan peserta laki-laki merasakan pemenuhan kebutuhan praktis yang lebih rendah daripada peserta perempuan.
- 5) Pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi yang setara gender berhubungan dengan tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender peserta produk pembiayaan. Semakin tinggi tingkat kesetaraan gender dalam pelaksanaan produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan BMT Swadaya Pribumi dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender peserta produk pembiayaan BMT Swadaya Pribumi.

## SARAN

- 1) Tujuan pembentukan BMT Swadaya Pribumi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, namun masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui BMT Swadaya Pribumi dan masyarakat pendatang yang berdomisili di sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong yang merasa dibedakan dalam mengakses produk pembiayaan dari BMT Swadaya Pribumi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan publikasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat (masyarakat pribumi atau pendatang yang berdomisili di sekitar Holcim Indonesia Pabrik Narogong), terutama masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk kesejahteraan hidup mereka agar masyarakat dapat mengakses produk pembiayaan maupun produk simpanan di BMT Swadaya Pribumi.
- 2) Bias gender dalam BMT Swadaya Pribumi dapat diminimalisir dengan cara memberikan akses dan kontrol terhadap masyarakat untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dari kegiatan di BMT Swadaya Pribumi tanpa membedakan gender mereka.
- 3) Pelatihan dan pendampingan terhadap usaha peserta produk pembiayaan perlu dilakukan secara rutin dan mendalam kepada setiap peserta agar usaha yang ditekuni peserta produk pembiayaan dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2004. Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Departemen Kehutanan. [diunduh 28 Mei 2011]. Dapat diunduh dari: [http://www.dephut.go.id/halaman/pengarusutamaa\\_n\\_gender/pug/1\\_528\\_04.htm](http://www.dephut.go.id/halaman/pengarusutamaa_n_gender/pug/1_528_04.htm).

- [Inpres] Instruksi Presiden. 2000. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Jakarta [ID]: Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. 30 hal.
- Handayani T dan Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Edisi Revisi. Surya Dharma (ed). Malang [ID]: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hubeis AVS. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor [ID]: IPB Press.
- Koesoemowidjojo SE. 2000. Peranan Gender dalam Rumah tangga Penerima Kredit Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Bogor. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
- Lu'lu. 2005. Analisis Gender terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
- Radyati MRN. 2008. CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta [ID]: Yayasan Indonesia Business Links.
- Simatauw M, Simanjuntak L, dan Kuswardono PT. 2001. Gender & Pengelolaan Sumberdaya Alam. Yogyakarta [ID]: Yayasan PIKUL.
- Singarimbun M dan Effendi S. 2008. Metode Penelitian Survei (Cetakan ke-19). Jakarta [ID]: LP3ES.
- Solihin I. 2009. Corporate Social Responsibility: From Chairity to Sustainability. Jakarta [ID]: Salemba Empat.
- Sukada S, Wibowo P, Ginano K, Jalal, Kadir I, dan Rahman T. 2007. CSR for Better Life: Indonesian Context. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta [ID]: Yayasan Indonesia Business Links.
- Wibisono Y. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik [ID]: Fascho Publishing.